

# **PENERAPAN COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGELOLAAN POTENSI WISATA BAHARI SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PANGANDARAN**

## ***(IMPLEMENTATION OF COMMUNITY BASED TOURISM IN MANAGEMENT OF SUSTAINABLE MARINE TOURISM POTENTIAL IN PANGANDARAN DISTRICT)***

**Ade Tri Putra\*, Djoko S. Abi Suroso**

Institut Teknologi Bandung

\* [adetriputra1@gmail.com](mailto:adetriputra1@gmail.com)

### ***Abstract***

*Mount Pancar Nature Park is located in the Sentul area, Bogor Regency, West Java. This tourist attraction has natural tourism potential which is very suitable as a location for health tourism. The purpose of this study was to examine the potential for nature tourism. The development of Wellness Tourism can be a choice of new activities besides just enjoying nature tourism in tourist attractions. Methods of data collection are done by observation, interviews, literature study, and documentation. Determining informants using purposive sampling by conducting in-depth interviews with managers and visitors with amount thirty people. The data obtained were analyzed using an interactive model. The results of this study are the potential for nature tourism in the Gunung Pancar Nature Tourism Park in the form of pine forests, open natural areas, and paths for sports activities. Wellness Tourism activities are divided into four categories, namely: mind mental activity or education in the form of activities to open mind-body therapy training, health nutrition or diet in the form of serving healthy food from places to eat, body physical fitness or treatment beauty in the form of cycling sports, open aerobics classes in nature and jogging, and relaxation rest or meditation, namely doing yoga activities.*

**Keywords:** *Community Based Tourism, Sustainable Tourism, Marine Tourism*

### **Abstrak**

Wisata bahari memegang manfaat penting bagi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dalam kondisi ini perlu menyadari pentingnya pengelolaan wisata alam bahari di Kabupaten Pangandaran. Beberapa objek wisata di Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan karena minimnya pengelolaan akibat kurangnya perhatian pemangku kepentingan di objek wisata tersebut yang berdampak pada berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan. Dalam hal ini perlu adanya penerapan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya menjaga dan melestarikan kawasan konservasi melalui kegiatan wisata alam bahari dengan memperhatikan unsur edukasi dan peningkatan taraf masyarakat lokal dalam mengedepankan prinsip ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan. Penulis menggunakan parameter *Coastal Tourism* dengan prinsip *Community Based Tourism* secara berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata bahari di Kabupaten Pangandaran, yang nantinya memunculkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya secara optimal dari parameter yang dikaji menggunakan konsep yang relevan dari *World Tourism Organization*, lalu penelitian ini menggunakan kerangka kerja sebab akibat untuk menggambarkan interaksi antara masyarakat dan lingkungan atau sebaliknya karena saling ketergantungan, dengan menggunakan DPSIR: *Drivers, Pressure, State, Impact* dan *Response*.

**Kata kunci:** *Community Based Tourism, Wisata Berkelanjutan, Wisata Bahari*

## PENDAHULUAN

Wilayah pesisir memiliki potensi berupa keunikan dan keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata sehingga aktivitas pariwisata dapat dikembangkan dan menghasilkan dampak positif dengan ikut meningkatkan perekonomian kawasan. Pengembangan pariwisata bahari pada dasarnya difokuskan pada pemandangan alam yang menjadi nilai karakteristik keunikan objek wisata tersebut. Keterlibatan komunitas masyarakat sadar wisata sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing – masing daerah dengan melihat implikasi negatif pada terdegradasinya lingkungan akibat eksploitasi sumber daya untuk aktivitas pariwisata, sehingga diperlukan pengelolaan dengan memperhatikan prinsip komunitas berbasis masyarakat dalam pengembangan wisata bahari secara berkelanjutan juga dapat memberikan implikasi positif bagi kelestarian lingkungan pesisir. Menurut Fandeli (2002), daya tarik wisata bahari bersumber dari bentang laut *seascope* dan bentang darat *coastal landscape*. Keindahan alam, pantai berpasir, terumbu karang, kekayaan sejarah alam merupakan atraksi utama bagi wisatawan baik itu wisatawan yang mencari ketenangan dan rekreasi maupun bagi wisatawan minat khusus yang lebih mencari aktivitas yang bersifat menantang seperti *fishing* atau *diving* (Inskeep, 1991). Terdapat suatu kawasan yang memiliki keunikan dan keindahan wisata bahari yakni di Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi yang dapat dikembangkan secara optimal, menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat lokal. Menurut data BPS Kabupaten Pangandaran Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabuapten Pangandaran mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi covid-19. Pada jumlah kunjungan mancanegara tertinggi pada tahun 2019 sebesar 12.233 wisman, di tahun 2020 BPS tidak mencatat wisman karena pandemi *covid-19*. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat 15 wisman yang berkunjung ke pangandaran. Untuk wisatawan nusantara pada 2018-2019 mengalami penurunan yang signifikan, jumlah kunjungan tertinggi di tahun

2021 yaitu 3,6 juta wisatawan nusantara, menjadikan puncak tertinggi selama periode tersebut. Namun di samping itu dalam perkembangannya sektor pariwisata, tentu menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kawasan pesisirnya, permasalahan tersebut apabila tidak ditindaklanjuti akan mempengaruhi keberlanjutan dan keberadaan wisata bahari. Dalam hal itu perlu adanya kelompok masyarakat sadar wisata yang berperan aktif dalam melestarikan lingkungan di wilayah pesisir, hal tersebut akan memproteksi terkait dengan dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan ekosistem. Menurut pendapat Beeton (2006) dan Junaidi (2017) dalam Junaid dan Salim (2019), menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan disebut dengan pariwisata berbasis masyarakat *community based tourism*. Rahayu, Dewi, dan Fitriana (2016) berpendapat, yang menghambat kelompok wisata dalam mengembangkan industri pariwisata adalah kurangnya sumber dana, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya inovatif, kreatif, dan dukungan pihak swasta. Rahayu dkk. (2016) tidak menyebutkan ketidakadaan dukungan pihak pemerintah sebagai penghambat *community based tourism*, padahal pemerintah memiliki andil yang cukup besar dalam mempengaruhi perkembangan industri pariwisata. Namun kembali lagi, karena pengembangan industri pariwisata berdasarkan *community based tourism* dalam *community group* seharusnya tidak tergantung pada dukungan pihak swasta dan/atau pemerintah. Ketika *community based tourism* sudah mapan dalam bentuk *community group* dan mampu menjalankan manajemen organisasi dengan sendirinya investor akan masuk, baik itu dari pemerintah maupun swasta. . Dalam hal ini perlu adanya penerapan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya menjaga dan melestarikan kawasan konservasi melalui kegiatan wisata alam bahari dengan memperhatikan unsur edukasi dan peningkatan taraf masyarakat lokal dalam mengedepankan prinsip ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis peran apa saja yang dilakukan oleh *community based tourism* dalam pengelolaan potensi wisata bahari secara berkelanjutan di kabupaten pangandaran dengan memerhatikan *safeguarding distinctiveness* dan *holistic approach*. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran, evaluasi, dan upaya perbaikan pada objek destinasi di Kabupaten Pangandaran.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang dipublikasikan seperti: BPS, RT/RW, Pemprov Jabar, Jurnal Ilmiah, dan Dinas Pariwisata Kab Pangandaran. Dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas, juga mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dianalisis menggunakan DPSIR dengan menguraikan *driving force* (faktor penyebab), *pressure* (tekanan/ faktor pendorong yang mempercepat perubahan kondisi suatu keadaan), *states* (kondisi awal), *impact* (dampak dari perubahan tersebut), serta *responses* (respon dari *stakeholder*/subjek terkait terhadap perubahan tersebut). Kerangka konseptual DPSIR direkomendasikan karena kemampuannya menyederhanakan informasi dan telah banyak digunakan sebagai alat analisis dalam manajemen lingkungan (Kristensen, 2004).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fasilitas penunjang wisata di Kabupaten Pangandaran kondisinya memadai, menurut Dinas Pariwisata Kab, Pangandaran, terdapat hotel dengan berbagai variasi kamar, restoran, masjid, pusat oleh-oleh cinderamata, toilet umum, fasilitas parkir yang luas, tempat hiburan, tourist center, juga fasilitas penunjang rumah sakit dan tempat rekreasi di sepanjang pantai pangandaran. Wisata Bahari di Kabupaten Pangandaran juga memberikan pelayanan yang cukup bagi para wisatawannya untuk melakukan berbagai kegiatan wisata. Sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga air (banana boat, snorkeling, surfing, berenang), kegiatan penjelajahan menggunakan perahu pesiar dan kegiatan lainnya sudah tersedia dengan baik. Fasilitas khusus untuk

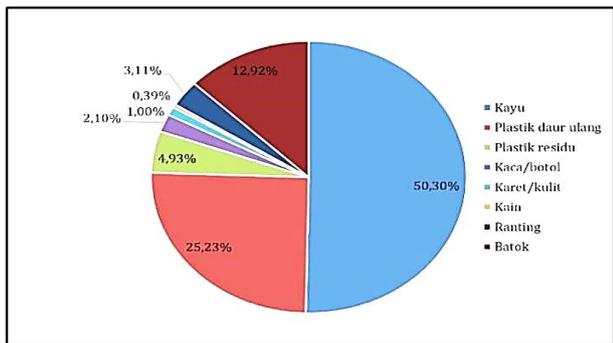
sampah wisatawan perlu ditingkatkan karena tempat pembuangan sampah, yang memang masih belum dikelola dengan baik oleh stakeholder di kawasan pantai. Hal tersebut dapat dilihat seberapa besar komposisi yang didapatkan dari kegiatan wisata pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Komposisi Sampah pada Aktivitas Wisata Kab, Pangandaran

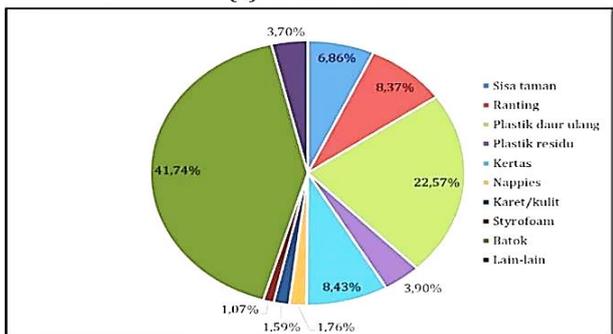
| No | Komponen           | Komposisi (%)        |                    |
|----|--------------------|----------------------|--------------------|
|    |                    | Aktivitas pariwisata | Sampah bawaan laut |
| 1  | Sisa dapur         | 44,68%               |                    |
| 2  | Sisa taman         | 13,48%               | 3,43%              |
| 3  | Ranting            | 2,95%                | 5,74%              |
| 4  | Plastik daur ulang | 3,34%                | 23,90%             |
| 5  | Plastik residu     | 4,46%                | 4,42%              |
| 6  | Kertas             | 3,14%                | 4,22%              |
| 7  | Kaca/botol         | 1,14%                | 1,05%              |
| 8  | Nappies            | 2,52%                | 0,88%              |
| 9  | Karet/Kulit        | 0,41%                | 1,30%              |
| 10 | Kain               | 0,93%                | 0,19%              |
| 11 | Styrofoam          | 2,14%                | 0,54%              |
| 12 | Kayu               | 1,15%                | 25,15%             |
| 13 | Kaleng/Besi        | 0,77%                |                    |
| 14 | B3                 | 0,005%               |                    |
| 15 | Batok kelapa       | 9,02%                | 27,33%             |
| 16 | Lain-lain          | 9,87%                | 1,85%              |

Sumber: Jurnal Permukiman PUPR (2019)

Berdasarkan hasil pengukuran komposisi diketahui bahwa sampah aktivitas wisata seperti hotel, rumah makan, dan warung didominasi oleh sampah dapur dan sisa makanan sebanyak 44,68% dan sampah taman berupa daun sebanyak 13,48% yang dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



(a) Pantai Barat



(b) Pantai Timur

Gambar 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara  
Sumber: Jurnal Permukiman PUPR, 2019

Komposisi sampah bawaan laut di Pantai Timur didominasi oleh batang kayu (50,3%) kemudian diikuti oleh sampah botol plastik dan plastik pembungkus makanan (25,23%), sampah lain yang juga banyak ditemui di Pantai Timur adalah batok kelapa, yaitu sebanyak 12,92%. Sementara sampah bawaan laut di Pantai Barat lebih didominasi oleh batok kelapa (41,74%) diikuti oleh sampah botol plastik dan plastik pembungkus makanan (22,57%).

Aksesibilitas Kab. Pangandaran



Gambar 2 Sistem Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara  
Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Pangandaran

Gambar 2 menjelaskan mengenai sistem jaringan transportasi aksesibilitas terkait mobilisasi masuknya kawasan di Kab. Pangandaran. Dilihat bahwa transportasi darat seperti mobil, bus dan kereta api berada di 2 titik. Pertama yakni berada di Kec. Cijulang dan kedua khusus pintu masuk kawasan pariwisata yang berada di Kec. Pangandaran. Kemudian untuk akses jalur laut terdapat 2 titik, pertama di jalur Sukanagara-Padaherang-Majingklak Kalipucang, kedua pelabuhan Bojongsalawe, yang berada di Kec. Parigi dan akses udara berada di Kec. Cijulang yakni Bandara Nusawiru.

Tabel I Jumlah dan jenis kendaraan di Kab. Pangandaran 2019-2020

| Jenis kendaraan   | 2019        | 2020        |
|-------------------|-------------|-------------|
| Angkutan kota     | 4           | 2           |
| Angkutan pedesaan | 13          | 5           |
| Mobil penumpang   | 0           | 0           |
| Bus               | 0           | 0           |
| Mikro bus         | 35          | 19          |
| Mini bus          | 17          | 13          |
| Truk              | 917         | 818         |
| Box               | 124         | 110         |
| Pick up           | 1477        | 1415        |
| Tanki             | 0           | 0           |
| Kereta gandengan  | 0           | 1           |
| Mixer             | 0           | 22          |
| <b>Total</b>      | <b>2587</b> | <b>2405</b> |

Sumber: BPS Kab Pangandaran

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sarana angkutan darat di Kabupaten Pangandaran terdapat mikro bus 35 dan mini bus 17, sedangkan angkutan pedesaan/rural transport sebesar 13 dan angkutan kota terdapat 4 di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah angkutan darat di Kabupaten Pangandaran, hal tersebut dikarenakan pandemi covid, membuat beberapa titik daerah tujuan dibatasi terkait mobilisasi masyarakat.

Berdasarkan data Pemprov Jabar (2017) penerbangan di Bandar Udara Nusawiru yang mempunyai penerbangan Bandung dan Jakarta mulai dari 10.30 sampai dengan 13.30 dengan rute yang berbeda di setiap harinya. Kemudian berdasarkan data Dinas Pariwisata Kab Pangandaran

(2019) tingkat kunjungan wisatawan tertinggi berada di Pantai pangandaran pada tahun 2018 10 berjumlah 2.789.905 dan di tahun 2019 berjumlah 2.187.956. Pantai Pangandaran merupakan destinasi unggul yang dimiliki Kabupaten Pangandaran saat ini, walaupun Kabupaten Pangandaran memiliki banyak sekali daya tarik wisata yang ditawarkan tetapi pantai Pangandaran ini tidak pernah sepi dari wisatawan.

### **Prinsip CBT Wisata Bahari Berkelanjutan Prinsip Sosial Ekonomi**

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan POKDARWIS maupun bukan anggota mengisyaratkan bahwa ada jenis pekerjaan yang ditentukan berdasarkan standar pelayanan oleh kelompok pengelolaan yang di mana kelompok tersebut terlibat dalam kegiatan pariwisata seperti wisata alam, budaya dan minat khusus di Kab Pangandaran. Sehingga kehadiran obyek wisata ini telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakatnya yang dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat. Dilihat jumlah kunjungan di destinasi wisata bahari memiliki pertumbuhan yang signifikan, pada kunjungan wisatawan nusantara dengan memanfaatkan potensi wisata alam, budaya dan minat khusus di kawasan Pangandaran. Sebaliknya untuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan signifikan akibat pandemi covid-19. Dalam hal tersebut keikutsertaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kualitas industri pariwisata secara optimal melalui investasi dan penanaman modal yang dilakukan pemerintah pusat Kemenparekraf melalui program pemulihan ekonomi ke sejumlah daerah terutama Pangandaran yakni BIP Bantuan Insentif Daerah pada tahun 2021, yang dapat memberikan dorongan pada kelompok masyarakat yang terlibat di industri pariwisata dan kreatif di Kab. Pangandaran. Menurut Agus Affandi (2013), penguatan komunitas memiliki makna untuk lebih-mampukan individu agar lebih mampu berperan dalam kelompok masyarakat global, dalam proses peningkatan kemampuan individu, kelompok organisasi dan kelembagaan untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara

berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wisata bahari di Kab. Pangandaran sudah dikelola dengan prinsipnya terkait koordinasi pemerintah pusat ke daerah

### **Prinsip Budaya**

Di wisata bahari menampilkan pertunjukan dengan nuansa laut yang mempesona, yang di mana acara tersebut dipadukan dengan kebudayaan pentas seni dan wayang golek khas Jawa Barat di destinasi Kab. Pangandaran yaitu Event Pesona Purnama Pesisir Pangandaran dan Event Kite. Pada prinsip tersebut perlu ditingkatkan yang mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda dan memperkenalkan pertukaran budaya daerah melalui atraksi wisata alam dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengembangkan potensi budaya Jawa Barat melalui Event musiman pantai pesisir

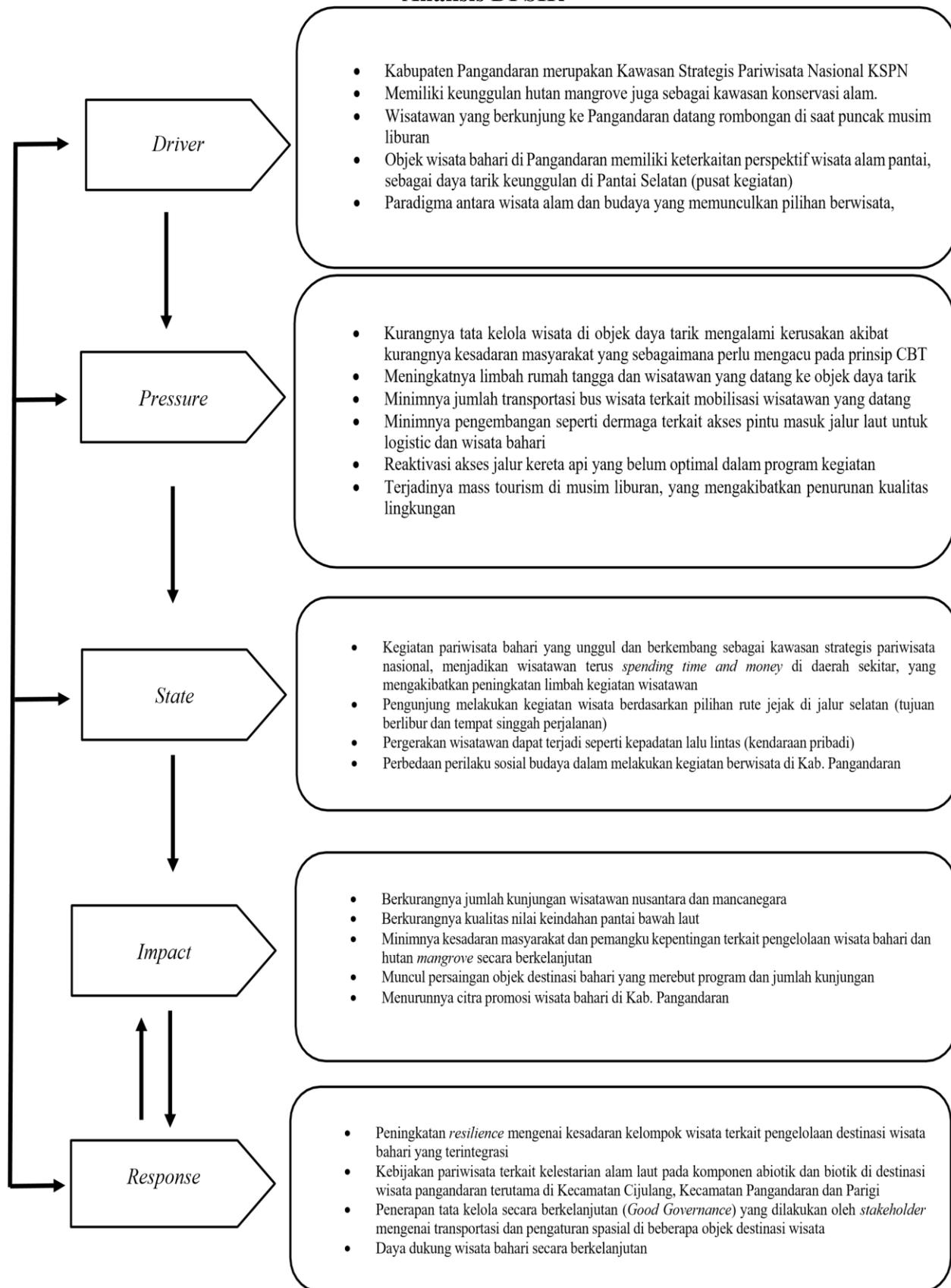
### **Prinsip Politik**

Dilihat dari data sistem jaringan transportasi terutama di darat seperti: aktivasi jaringan kereta api antar kota banjar-cijulang, optimalisasi pengembangan terminal, pengembangan angkutan penyebrangan jalur laut dan pembangunan pelabuhan baru di kecamatan Pangandaran. Hal tersebut perlu adanya kesadaran kelompok masyarakat terkait peningkatan mobilisasi pariwisata yang datang, yang sebagaimana direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Kab. Pangandaran yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Pangandaran dalam peningkatan koordinasi pemangku kepentingan terkait pembangunan akses kawasan wisata secara terintegrasi.

### **Prinsip Lingkungan**

Seiring peningkatan destinasi pada jumlah kunjungan di Pangandaran, berdampak pada kualitas daya dukung lingkungan berkurang terutama di Pantai Barat mengalami peningkatan limbah aktivitas pariwisata seperti: sampah plastik, makanan kemasan, dan limbah dapur makanan. Hal tersebut perlu adanya peran masyarakat dalam pengembangan fasilitas dan sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan, dan memberikan edukasi perihal kepedulian tentang pentingnya konservasi.

### Analisis DPSIR



Gambar 1 Analisis DPSIR

Analisis yang digunakan yaitu DPSIR dengan menguraikan *driving force* (faktor penyebab), *pressure* (tekanan/ faktor pendorong yang mempercepat perubahan kondisi suatu keadaan), *states* (kondisi awal), *impact* (dampak dari perubahan tersebut), serta *responses* (respon dari stakeholder/subjek terkait terhadap perubahan tersebut). Dengan menguraikan permasalahan dan kompleksitas kegiatan aktivitas pariwisata di Kawasan Kab. Pangandaran. Analisis terhadap dinamika yang ada memberikan rekomendasi serta strategi untuk menghadapinya dapat lebih mudah dirumuskan secara komprehensif dan sistematis.

## KESIMPULAN

Penerapan *community based tourism* dalam pengelolaan potensi wisata bahari secara berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran cukup baik, hal ini ditandai dengan implementasi yang dilakukan oleh Kabupaten Pangandaran yaitu berdasarkan data sekunder yang didapatkan masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan POKDARWIS maupun bukan anggota mengisyaratkan bahwa ada jenis pekerjaan yang ditentukan berdasarkan standar pelayanan oleh kelompok pengelolaan yang di mana kelompok tersebut terlibat dalam kegiatan pariwisata seperti wisata alam, budaya dan minat khusus di Kab Pangandaran. Sehingga kehadiran obyek wisata ini telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakatnya yang dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat. Dalam hal tersebut keikutsertaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kualitas industri pariwisata secara optimal melalui investasi dan penanaman modal yang dilakukan pemerintah pusat Kemparekraf melalui program pemulihan ekonomi ke sejumlah daerah terutama Pangandaran yakni BIP Bantuan Insentif Daerah pada tahun 2021, yang dapat memberikan dorongan pada kelompok masyarakat yang terlibat di industri pariwisata dan kreatif di Kab. Pangandaran. Lalu, masyarakat sekitar juga berpartisipasi memperkenalkan pertukaran budaya daerah melalui atraksi wisata alam dalam mengembangkan potensi budaya Jawa Barat melalui *event* musiman pantai pesisir.

Berdasarkan temuan penelitian lainnya, ditemukan bahwa dari data sistem jaringan transportasi terutama di darat seperti: aktivasi jaringan kereta api antar kota banjar-cijulang, optimalisasi pengembangan terminal, pengembangan angkutan penyebrangan jalur laut dan pembangunan pelabuhan baru di kecamatan Pangandaran. Hal tersebut perlu adanya kesadaran kelompok masyarakat terkait peningkatan mobilisasi pariwisata yang datang, yang sebagaimana direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Kab. Pangandaran yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Pangandaran dalam peningkatan kordinasi pemangku kepentingan terkait pembangunan akses kawasan wisata secara terintegrasi. Kemudian, apabila dilihat dari aspek lingkungan perlu adanya peran masyarakat dalam pengembangan fasilitas dan sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan, dan memberikan edukasi perihal kepedulian tentang pentingnya konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amallia Ashuri, Tuti Kustiasih. (2019). Timbulan dan Komposisi Sampah Wisata Pantai Indonesia, Studi Kasus: Pantai Pangandaran. Jurnal BPS Kab Pangandaran. 2022. Data & Informasi Statistik Dalam Angka 2022. (Online), (<https://pangandarankab.bps.go.id/publication.html>). Diakses tanggal 28 Mei 2022
- Disprov Jabar. 2021. Dinas Publikasi Pariwisata Provinsi Jawa Barat. <https://disparbud.jabarprov.go.id>. Diakses tanggal 25 Mei 2022
- Fandeli Chafid. (2002). Perencanaan Kepariwisata Alam. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Inskeep Edward (1991). *Tourism and Planning An Integrated And Sunstaintable Development Approach*. New York : Van Norstand Reinhold Suansri, Potjana, *Community Based Tourism Handbook* (Thailand: REST Project, 2003).

- Junaid, I dan Salim, M.A.M. (2019). Peran Organisasi Tata Kelola dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*. Volume 1, No.1, halaman 1-7.
- Kompas News. 2022. Kondisi Pantai Kabupaten Pangandaran. Diakses 29 Mei 2022 <https://superapps.kompas.com/read/3736969/pantai-pangandaran-kotor-seusai-diserbu-wisatawan-susi-pudjiastuti-bersih-bersih-bareng-cucu>
- Kristensen, 2004. The DPSIR Framework. Proceeding at the 27-29 September 2004 workshop on a comprehensive / detailed assessment of the vulnerability of water resources to environmental change in Africa using river basin approach. UNEP Headquarters, Nairobi, Kenya
- Peraturan Edaran Mendagri No. 660.1/836/V/Bangda, 2001
- Rahayu, S., Dewi, U., dan Fitriana, K.N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Volume 21, No. 1, halaman 1-13.
- The International Ecotourism Society (TIES). 1990. Ecotourism is responsible travel to natural. Diakses tanggal 28 Mei 2022
- Undang Undang tentang Kepariwisataaan, UU No. 10 Tahun 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan HAM
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Penganggulangan Bencana, (2007). Peraturan No. 90 Tahun 2020 mengenai Kelompok Sadar Wisata
- World Tourism Organization. 2007. A Practical Guide to Tourism Destination Management. Spain: World Tourism Organization.
- Yaya Supaya. 2019. Peta Kesigapan Masyarakat Kawasan Bencana Kab. Pangandaran: Penelitian Ilmiah Universitas Pasundan